

Wacana Kekuasaan dalam Budaya Cancel Culture terhadap Abizar Al Ghifari di Film *Proposal Business*

Muhammad Dani Ilham Firmansyah^{1✉}, Riski Abrian²

Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya¹

✉ daniilhamff01@gmail.com rizky.abrian@uinsby.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the discourse of power in the phenomenon of cancel culture toward Abizar Al Ghifari in the promotion of the film *Proposal Business*, and how language contributes to constructing symbolic domination in digital spaces. The research employs a qualitative method with Fairclough's critical discourse analysis approach, which emphasizes power relations in public communication. Data were collected from netizens' comments on the film's social media posts and analyzed based on speech patterns, commands, sarcasm, and moral evaluation. The findings indicate that netizens position themselves as moral authorities, reprimanding and judging public figures deemed to violate social norms. This discourse reflects the reproduction of moral values and collective identity in Indonesian digital society. In conclusion, cancel culture is not merely a form of individual rejection but a socio-linguistic practice that asserts the dominance of public voices in digital popular culture, highlighting the complex relationship between language, power, and social control.

Keywords: cancel culture, discourse of power, symbolic domination, social control, Fairclough, digital culture

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana kekuasaan dalam fenomena cancel culture terhadap Abizar Al Ghifari pada promosi film *Proposal Business*, serta bagaimana bahasa berperan dalam membangun dominasi simbolik di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Fairclough, yang menekankan relasi kuasa dalam komunikasi publik. Data dikumpulkan dari komentar netizen pada unggahan film di platform media sosial, kemudian dianalisis berdasarkan pola tuturan, nada perintah, sarkasme, dan evaluasi moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa netizen memosisikan diri sebagai otoritas moral, menegur dan mengadili figur publik yang dianggap melanggar norma sosial. Wacana ini merefleksikan mekanisme reproduksi nilai moral serta identitas kolektif masyarakat Indonesia dalam ruang digital. Kesimpulannya, cancel culture tidak hanya merupakan bentuk penolakan individu, tetapi juga praktik sosial-linguistik yang menegaskan dominasi suara publik dalam budaya populer digital, sekaligus menunjukkan hubungan kompleks antara bahasa, kekuasaan, dan kontrol sosial.

Kata kunci: cancel culture, wacana kekuasaan, dominasi simbolik, kontrol sosial, Fairclough, budaya digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengekspresikan pendapat di ruang publik. Media sosial seperti TikTok, Twitter (X),

Instagram, dan YouTube bukan lagi sekadar sarana berbagi hiburan, tetapi juga arena pembentukan opini, kritik, dan bahkan pengadilan sosial. Salah satu fenomena yang muncul sebagai bagian dari dinamika tersebut adalah *cancel culture*, yakni praktik sosial di mana sekelompok pengguna media sosial bersepakat untuk menolak, memboikot, atau “membatalkan” figur publik yang dianggap melakukan kesalahan moral, sosial, atau profesional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi alat kekuasaan baru di dunia digital, di mana opini kolektif dapat memengaruhi reputasi dan karier seseorang (Altamira and Movementi, 2023).

Cancel culture di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya budaya partisipatif di media sosial. Publik kini merasa memiliki hak untuk menilai dan mengontrol perilaku figur publik berdasarkan standar moral bersama. Bentuk-bentuk *cancel* muncul melalui tagar, komentar sarkastik, ujaran sindiran, hingga ajakan untuk tidak mendukung seseorang atau produk tertentu. Fenomena ini memperlihatkan adanya relasi kekuasaan antara masyarakat digital dan figur publik, di mana wacana dan bahasa yang digunakan tidak hanya mencerminkan opini, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan sosial (Kevin, 2023).

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah reaksi netizen terhadap Abizar Al Ghifari, aktor muda yang membintangi film *Proposal Business*. Sebagai anak dari tokoh publik religius, Abizar tidak lepas dari perhatian media dan masyarakat. Kehadirannya di dunia hiburan sering kali dikaitkan dengan isu privilege dan nepotisme, di mana publik menilai kesuksesannya lebih karena status keluarga daripada kemampuan pribadi. Reaksi-reaksi tersebut muncul dalam bentuk komentar, kritik, dan sarkasme di berbagai platform media sosial, terutama saat promosi film berlangsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa *cancel culture* di Indonesia tidak hanya soal kesalahan moral, tetapi juga terkait wacana keadilan sosial dan akses terhadap kekuasaan.

Objek penelitian ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana figur publik muda menghadapi pembentukan opini kolektif dan penghakiman publik berbasis bahasa. Kasus Abizar menggambarkan bagaimana media sosial menciptakan arena baru bagi publik untuk menentukan siapa yang dianggap “layak” berada di ruang hiburan. Wacana yang terbentuk bukan hanya tentang akting dan film, tetapi tentang legitimasi sosial, keadilan, dan moralitas publik figur di era digital.

Dari sudut pandang Analisis Wacana Kritis (AWK), praktik *cancel culture* terhadap Abizar dapat dibaca sebagai manifestasi kekuasaan simbolik. Netizen tidak hanya mengomentari, tetapi juga menciptakan dan mereproduksi ideologi tertentu melalui pilihan kata, metafora, dan nada bahasa yang digunakan. Bahasa sarkastik, moralistik, dan bernada penghakiman menjadi instrumen yang efektif dalam membentuk persepsi kolektif. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak lagi berada di tangan institusi media arus utama, melainkan berpindah kepada pengguna media sosial yang mampu memobilisasi opini publik. Dengan kata lain, *cancel culture* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis wacana (Yasa, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk wacana kekuasaan yang muncul dalam praktik *cancel culture* terhadap Abizar Al Ghifari, mengidentifikasi strategi linguistik yang digunakan netizen untuk menciptakan legitimasi dan kontrol sosial, serta mengungkap ideologi dan nilai moral yang direproduksi melalui wacana tersebut. Melalui analisis wacana kritis model Norman Fairclough, penelitian ini berupaya membongkar hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial yang terjadi di ruang digital Indonesia.

Fenomena ini penting untuk diteliti karena mencerminkan pergeseran bentuk kekuasaan di era digital. Jika dahulu kekuasaan bersumber dari media dan institusi besar, kini kekuasaan itu dimiliki oleh publik melalui bahasa dan narasi yang mereka bangun di media sosial. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik *cancel culture* beroperasi di Indonesia, khususnya dalam konteks budaya populer dan industri hiburan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan refleksi kritis terhadap dampak sosial dari penggunaan bahasa dalam ruang digital, baik bagi figur publik maupun masyarakat luas.

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian linguistik kritis dan sosiolinguistik digital, terutama dalam memahami bagaimana wacana membentuk realitas sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi publik figur, pembuat konten, dan pengguna media sosial agar lebih bijak dalam memproduksi maupun merespons wacana publik. Dengan meneliti kasus Abizar di film *Proposal Business*, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap bagaimana bahasa bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan yang membentuk legitimasi, kontrol, dan moralitas di era media sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis / CDA)

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan pendekatan linguistik yang berfokus pada hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks sosial. Menurut Norman Fairclough, wacana bukan hanya sekadar bentuk komunikasi, tetapi juga praktik sosial yang memproduksi dan mereproduksi struktur kekuasaan di masyarakat. Melalui bahasa, seseorang dapat membangun dominasi, mempertahankan ideologi, dan memengaruhi tindakan sosial (Fairclough, 2003).

Fairclough mengembangkan model tiga dimensi analisis wacana, yaitu:

1. Teks (micro level): menganalisis struktur bahasa, seperti pilihan kata, metafora, modalitas, dan gaya tutur.
2. Praktik wacana (meso level): menganalisis proses produksi dan konsumsi teks, termasuk bagaimana media sosial menjadi ruang penyebaran dan reproduksi makna.
3. Praktik sosial (macro level): menganalisis konteks sosial yang lebih luas, termasuk ideologi, kekuasaan, dan relasi sosial yang mendasari wacana tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, AWK digunakan untuk membongkar bagaimana wacana publik di media sosial membentuk relasi kekuasaan antara masyarakat dan figur publik, serta bagaimana opini kolektif menjadi bentuk kontrol sosial terhadap Abizar Al Ghifari melalui praktik *cancel culture*.

Konsep Kekuasaan dalam Perspektif Foucault

Teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault (1980) menjadi dasar penting dalam memahami praktik *cancel culture*. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh lembaga atau individu yang berotoritas, tetapi tersebar di seluruh relasi sosial dan diekspresikan melalui bahasa serta pengetahuan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang bekerja melalui wacana dan praktik sosial (PRADANA, 2018).

Dalam konteks media sosial, kekuasaan bekerja secara horizontal, bukan vertikal. Artinya, publik memiliki kekuasaan untuk membentuk, menegur, bahkan “menghukum” figur publik melalui penggunaan bahasa, opini, dan komentar. Fenomena *cancel culture* menjadi manifestasi kekuasaan publik yang memanfaatkan wacana digital sebagai alat pengawasan moral dan sosial.

Dengan demikian, teori Foucault membantu menjelaskan bagaimana praktik *cancel culture* terhadap Abizar mencerminkan mekanisme disiplin sosial modern, di mana pengawasan dan hukuman tidak lagi dilakukan oleh lembaga formal, tetapi oleh masyarakat melalui narasi dan bahasa yang tersebar di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, yang menekankan hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam wacana *cancel culture* terhadap

Abizar Al Ghifari di media sosial. Data utama dalam penelitian ini berupa komentar netizen, unggahan, tagar, dan potongan narasi digital yang muncul di platform seperti TikTok, X (Twitter), dan Instagram terkait film *Proposal Business*. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi digital, dengan cara menelusuri, mengarsipkan, dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk ujaran yang mengandung opini, kritik, atau ekspresi *cancel* terhadap objek penelitian (Fiantika *et al.*, 2022).

Analisis dilakukan menggunakan tiga tahapan Fairclough, yaitu analisis teks (micro level) untuk melihat struktur linguistik seperti diksi, metafora, dan strategi retorik; analisis praktik wacana (meso level) untuk mengkaji proses produksi dan penyebaran makna melalui interaksi digital; serta analisis praktik sosial (macro level) untuk memahami konteks ideologis dan relasi kekuasaan yang melatarbelakangi wacana tersebut (Fairclough, 2002). Hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan sebagai alat pembentukan kekuasaan dan kontrol sosial dalam budaya *cancel* di Indonesia, khususnya pada kasus Abizar Al Ghifari di film *Proposal Business*.

PEMBAHASAN

Representasi Wacana Netizen terhadap Abizar

Pernyataan Abizar yang menyebut bahwa ia tidak menonton versi Korea, tidak ingin meniru karakter orang lain, serta menegaskan “kalau nggak suka ya nggak usah nonton” menjadi *trigger* utama munculnya reaksi negatif publik. Dalam konteks film *Proposal Business* yang merupakan adaptasi dari drama Korea, pernyataan tersebut ditafsirkan oleh sebagian penggemar sebagai bentuk meremehkan fandom K-Drama, merendahkan karya asli, sekaligus menunjukkan sikap arogan sebagai figur publik.

Komentar-komentar yang muncul pada unggahan poster film *Proposal Business* di media sosial merupakan respons linguistik terhadap interpretasi publik tersebut. Warganet menggunakan bahasa sebagai sarana untuk menilai, mengkritik, bahkan menghukum secara simbolik. Akumulasi wacana bernada kecaman ini kemudian berkembang menjadi praktik *cancel culture* terhadap Abizar.

Film yang awalnya diprediksi akan meraih jumlah penonton tinggi karena antusiasme besar penggemar drama Korea di Indonesia justru mengalami penurunan drastis dalam penayangan. Publik lebih banyak membicarakan kontroversinya dibandingkan kualitas filmnya, sehingga citra Abizar sebagai pemeran utama berubah dari “aktor muda berbakat” menjadi “figur yang dibatalkan oleh publik”.

Dalam penelitian ini diperoleh dari kolom komentar unggahan poster promosi film *Proposal Business* di akun Instagram @abizarghifari. Unggahan tersebut mendapat banyak tanggapan dari warganet yang menyoroti sikap, kemampuan acting, serta nilai moral yang dilekatkan pada sosok Abizar sebagai figur publik muda dan anak selebritas terkenal.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, peneliti mengumpulkan 20 komentar yang mewakili pola umum wacana yang terbentuk di kolom komentar.

Secara umum, wacana yang muncul dapat dikategorikan ke dalam tiga tema besar, yaitu:

1. Kritik moral dan perilaku pribadi,
2. Kritik profesionalitas dan nepotisme, serta
3. Wacana cancel culture berupa ajakan boikot dan penghukuman sosial.

Komentar-komentar tersebut memperlihatkan bagaimana netizen tidak hanya menilai karya atau film yang dipromosikan, tetapi juga mengontrol citra sosial figur publik melalui bahasa evaluatif. Komentar bernada keras seperti “*Makanya jangan songong*”, “*BOYCOTTT!*”, atau “*karier lu udah hancur*” memperlihatkan adanya proses penghakiman sosial dan pembentukan kekuasaan simbolik publik. Bahasa yang digunakan cenderung emosional, sarkastik, dan bernuansa perintah, misalnya pada komentar “*Makanya klo mau ngomong tuh dipikir dulu*” atau “*100 kru itu harus tuntutan nih bocah*”.

Hal ini memperlihatkan bagaimana praktik cancel culture bekerja melalui kekuatan opini mayoritas netizen, yang secara diskursif menekan pihak yang dikritik.

Tabel 1. Pemetaan Komentar Netizen di Postingan Poster Film *Proposal Business* (Akun @abizarghifari)

No	Komentar Netizen	Kategori Wacana	Makna dan Interpretasi
1	“Makanya jangan songong.”	Kritik moral	Teguran sosial; bentuk pengawasan moral publik terhadap sikap figur.
2	“3 hari turun layar udah nggak ada.”	Sarkasme profesionalitas	Mengejek kegagalan film; simbol hilangnya dukungan publik.
3	“Bang mending nyanyi aja @ardhitopramono.”	Kritik kemampuan	Mengejek kemampuan akting, menyarankan profesi lain sebagai sindiran.
4	“BOYCOTTT!”	Cancel culture	Ajakan kolektif untuk memboikot; bentuk kekuasaan simbolik publik.
5	“Masih banyak film lain yang harus ditonton.”	Penolakan simbolik	Ajakan pasif untuk menjauh dari karya figur yang dibatalkan.
6	“Pentingnya sekolah biar tau adab.”	Kritik moral	Menilai moral figur berdasarkan latar pendidikan; bentuk <i>moral policing</i> .

7	“Makanya klo mau ngomong tuh dipikir dulu, bocah pick me problematic.”	Labelisasi sosial	Mengonstruksi identitas negatif figur; menunjukkan penilaian personal.
8	“Kok bisa dia sih pemeran utamanya?”	Kritik nepotisme	Meragukan keadilan dalam pemilihan aktor; indikasi privilese sosial.
9	“Sayangnya viral bukan karna banyak yang nonton tapi sebaliknya.”	Kritik popularitas	Menunjukkan fenomena <i>reverse fame</i> ; terkenal karena kontroversi.
10	“100 KRU ITU HARUS TUNTUT NIH BOCAH SIH.”	Cancel culture ekstrem	Representasi kemarahan publik; ajakan untuk tindakan simbolik.
11	“Bangg luuu pensili aja dahh, karier luuu udah hancur.”	Penghukuman sosial	Bahasa penghukuman; netizen bertindak sebagai pengadil sosial.
12	“Padahal masih banyak loh aktor lain, atau mereka kemahalan ya?”	Kritik industri hiburan	Ketidakpuasan terhadap sistem produksi film; bentuk kritik struktural.
13	“Berasa mirip Lee Min Ho aja makanya tamat sekolah biar tau attitude.”	Sarkasme sosial	Menggunakan humor untuk mempermalukan; penghakiman simbolik.
14	“Si bro bizerrr ngerasa paling ganteng cuihhh menyedihkan.”	Body shaming	Kekerasan simbolik berbasis fisik; mempermalukan secara publik.
15	“CEO apaan model begini.”	Kritik status sosial	Menolak legitimasi sosial figur sebagai ‘idola’.
16	“Kita diajarin jngn sombong sm bapaknya, lah ini malah sombong anaknya.”	Kritik moral & keluarga	Wacana intergenerasional; ekspektasi moral terhadap anak figur publik.
17	“Katanya situ paham agama kok suka adegan pegangan tangan sama yang bukan mahram.”	Kritik religius	Mengaitkan perilaku dengan nilai agama; bentuk hipokrisi publik.
18	“Gmn sih remake film Korea tp masa pke org prindapan.”	Kritik estetika	Representasi ekspektasi estetika; bias terhadap standar visual.

19	“Merugikan.”	Evaluasi ekonomi / sosial	Penilaian singkat namun tajam; bentuk penolakan simbolik.
20	“Ngapain juga ditonton film dia.”	Ajakan boikot	Seruan pasif untuk memutus dukungan konsumsi publik.

Dari tabel di atas, tampak bahwa mayoritas komentar bersifat negatif, evaluatif, dan bernuansa sarkastik, menunjukkan bentuk *cancel culture* yang tidak hanya menolak karya, tetapi juga menyerang identitas personal dan moral figur. Komentar-komentar ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk wacana kolektif yang meneguhkan nilai-nilai sosial tertentu seperti kesopanan, profesionalitas, dan religiusitas sebagai standar moral publik.

Secara linguistik, penggunaan kalimat perintah, sarkasme, dan pertanyaan retorik memperlihatkan bagaimana netizen membangun kekuasaan simbolik dalam ruang digital. Fenomena ini mendukung teori Fairclough bahwa bahasa adalah praktik sosial yang membentuk relasi kekuasaan, di mana publik menggunakan bahasa untuk mengontrol figur publik melalui opini dan tekanan moral.

1. Analisis Mikro (Teks / Bahasa)

Pada level mikro, fokus analisis diarahkan pada pilihan kata, gaya bahasa, dan struktur tuturan yang digunakan oleh netizen dalam mengomentari Abizar



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEjVvJESJUD/?igsh=MW5ieDU1M28wMmJsMQ==>

Secara linguistik, sebagian besar komentar memiliki ciri:

Kalimat perintah dan evaluatif seperti: “*Makanya jangan songong*”, “*BOYCOTTT!*”, atau “*Makanya klo mau ngomong tuh dipikir dulu.*”, “*100 KRU ITU HARUS TUNTUT NIH BOCAH SIH.*”

Komentar-komentar yang muncul pada unggahan poster film *Proposal Business* menunjukkan adanya bentuk tindakan tutur langsung (direct speech act) berupa perintah, sindiran, dan tuntutan terhadap Abizar. Ungkapan seperti “*Makanya jangan songong*”, “*BOYCOTTT!*”, dan “*Makanya klo mau ngomong tuh dipikir dulu*” merupakan contoh kalimat imperatif yang tidak hanya mengomentari, tetapi juga mengatur perilaku figur publik. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang digunakan

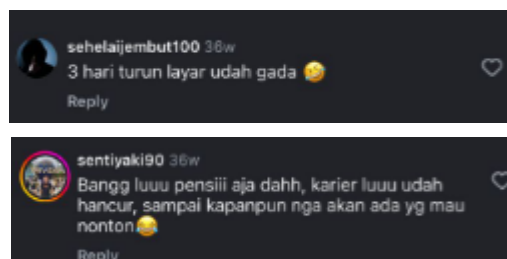
oleh publik untuk “menghukum” seseorang yang dianggap melanggar norma moral atau sosial.

Menurut kerangka analisis Fairclough, praktik bahasa semacam ini mencerminkan adanya dominasi simbolik di ranah wacana digital. Netizen menempatkan diri pada posisi dengan otoritas moral yang lebih tinggi dibanding figur publik yang dikritik. Dengan menggunakan kalimat perintah dan diksi evaluatif, mereka secara tidak langsung mengonstruksi hierarki sosial baru, di mana “suara publik” menjadi sumber legitimasi kekuasaan simbolik.

Penggunaan huruf kapital, repetisi, dan intonasi emosional seperti pada komentar “BOYCOTT!” memperkuat dampak linguistik dari wacana tersebut. Secara semiotik, bentuk ini berfungsi untuk menegaskan intensitas emosi kolektif dan menandai solidaritas sosial dalam tindakan pembatalan (cancel). Hal ini memperlihatkan bahwa budaya cancel culture di Indonesia bukan sekadar ekspresi kebencian individual, melainkan mekanisme tekanan sosial kolektif yang dibangun melalui bahasa.

Pernyataan Abizar seperti “*kalau nggak suka ya nggak usah nonton*” menjadi pemicu munculnya counter-discourse dari publik. Netizen kemudian memproduksi wacana tandingan yang bersifat *imperatif balik* (counter-command), seperti memerintahkan agar Abizar “belajar adab” atau menyerukan boikot. Dalam perspektif Fairclough, fenomena ini menunjukkan pergeseran posisi subjek dalam wacana, di mana netizen tidak lagi sekadar menjadi konsumen media, tetapi berubah menjadi agen kontrol moral yang aktif membentuk narasi sosial.

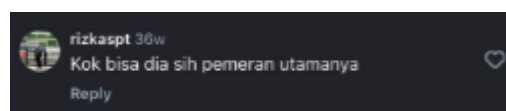
Bentuk-bentuk linguistik dalam komentar tersebut bukan sekadar cerminan emosi spontan, tetapi juga representasi dari praktik sosial yang mereproduksi nilai-nilai moral, hierarki simbolik, dan kekuasaan publik di ruang digital Indonesia.

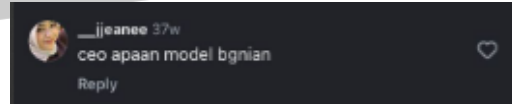


Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEjVvJESJUD/?igsh=MW5ieDU1M28wMmJsMQ==>

Gaya sarkastik dan hiperbolis seperti “3 hari turun layar udah nggak ada” atau “Karier lu udah hancur”.

Gaya sarkastik dan hiperbolis, dalam komentar diatas memperlihatkan praktik *discursive ridicule* yaitu usaha mempermalukan seseorang secara publik melalui bahasa. Sarkasme di sini tidak sekadar ejekan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjatuhkan legitimasi figur publik. Ini sejalan dengan karakter budaya cancel di Indonesia yang sering beroperasi lewat *humor, sindiran, dan ironi* untuk melunakkan bentuk hukuman sosial, namun tetap efektif menekan reputasi seseorang.

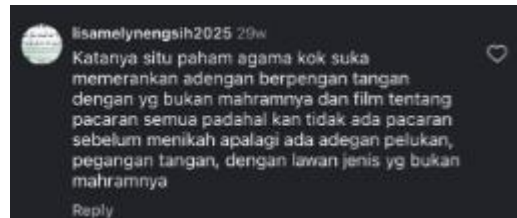
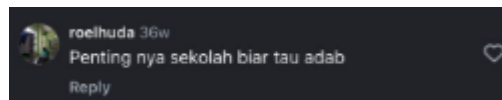




Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEjVvJESJUD/?igsh=MW5ieDU1M28wMmJsMQ==>

Dan pertanyaan retorik dan perbandingan seperti “*Kok bisa dia sih pemeran utamanya?*” dan “*CEO apaan model bgnian.*”

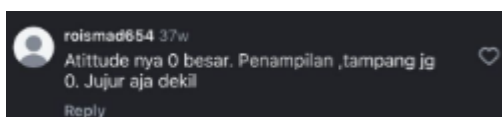
Dari komentar diatas menunjukkan cara netizen mengonstruksi *narrative judgment* terhadap kredibilitas profesional Abizar. Melalui pertanyaan bernada meremehkan ini, publik secara implisit menolak legitimasi sosial figur tersebut dan memposisikan dirinya sebagai pihak yang lebih berhak menilai kelayakan moral maupun profesional. Pilihan kata tersebut menunjukkan bahwa warganet tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi mengonstruksi posisi kekuasaan seolah memiliki otoritas untuk menilai dan mengadili figur publik. Dalam kaitannya dengan pernyataan yang diucapkan Abizar, membingkai dan membuktikan bahwa ia tak kompeten atau tak sensitif terhadap konteks adaptasi K-Drama sehingga layak dikritik atau “dibatalkan”.



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEjVvJESJUD/?igsh=MW5ieDU1M28wMmJsMQ==>

“Pentingnya sekolah biar tau adab.” ; “Katanya situ paham agama kok suka adegan pegangan tangan...”

Ketika Abizar diketahui berasal dari keluarga religius, komentar yang memakai diksi agama atau adab menuduh inkonsistensi (hipokrisi). Bahasa religius memberi dimensi moral kuat: bukan hanya soal akting, tetapi soal identitas moral. Dalam konteks Indonesia, di mana nilai agama memiliki bobot sosial besar, atribut moral ini memperkuat legitimasi kritik sehingga cancel mendapat pembenaran sosial.



Sumber:

<https://www.instagram.com/p/DEjVvJESJUD/?igsh=MW5ieDU1M28wMmJsMQ==>

“Penampilan, tampang juga O. Jujur aja dekil.” ; “remini banget anjir mukanya”

Serangan pada fisik mengalihkan isu dari pernyataan (substantif) ke aspek personal yang tak relevan dengan profesionalitas, namun efektif menghancurkan citra publik. Ini menunjukkan bahwa cancel culture tidak hanya berbasis argumentasi moral, melainkan juga praktik kekerasan simbolik yang menargetkan martabat individu.



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEjVvJESJUD/?igsh=MW5ieDU1M28wMmJsMQ==>

“Berasa mirip Lee Min Ho aja...” ; kritik terhadap adaptasi “Gmn sih remake film Korea tp masa pke org prindapan.”

Karena *Proposal Business* adalah adaptasi K-Drama yang punya fandom kuat di Indonesia, klaim Abizar bahwa ia tak meniru dan tak menonton versi asli dibaca sebagai pengkhianatan terhadap sumber asli dan fans. Bahasa komentar merefleksikan kekecewaan fandom: bukan hanya soal kualitas akting, tetapi soal penghormatan terhadap karya sumber. Wacana fandom ini menambahkan dimensi emosional dan protektif yang membuat cancel lebih mudah dipicu.

Bentuk bahasa ini sekaligus merepresentasikan praktik moral policing, di mana publik menegakkan norma sosial melalui bahasa. Dalam konteks Abizar, publik menggunakan bahasa untuk “mengatur” perilaku figur yang dianggap tidak pantas, sekaligus memperkuat identitas moral kolektif (“netizen yang benar”).

Pilihan kata yang kasar, sarkastik, dan evaluatif bukanlah sekadar ekspresi emosional spontan. Dalam pandangan Fairclough, setiap pilihan linguistik merepresentasikan praktik ideologis dalam hal ini ideologi moralitas dan kesetaraan sosial yang menjadi dasar budaya digital Indonesia. Netizen merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk menegakkan “norma sosial”, terutama ketika figur publik dianggap melanggar nilai kesopanan, adab, atau agama. Maka dari itu, bahasa menjadi sarana untuk menjalankan fungsi “moral policing”, di mana masyarakat memanfaatkan ruang digital sebagai arena kontrol perilaku publik.

2. Analisis Meso (Praktik Wacana)

Pada level meso, analisis diarahkan pada konteks produksi dan konsumsi wacana, termasuk bagaimana komentar tersebut muncul dan disebarkan di media sosial.

Produksi Wacana: Framing Media dan Pernyataan Awal Abizar

Wacana *cancel culture* terhadap Abizar bermula dari pernyataannya dalam wawancara promosi film *Proposal Business* yang diadaptasi dari drama Korea *Business Proposal*. Dalam wawancara tersebut, Abizar menyebutkan bahwa ia tidak meniru karakter versi Korea, tidak menonton film aslinya, dan menambahkan pernyataan “kalau nggak suka ya nggak usah nonton.” Pernyataan ini membentuk narasi awal yang kemudian diframing oleh media dan akun-akun hiburan di Instagram, TikTok, serta X (Twitter) dalam bentuk potongan video

pendek. Framing media berperan besar dalam *recontextualization* potongan kalimat Abizar diambil terpisah dari konteks wawancara lengkap dan diberi judul sensasional seperti “Abizar sindir fans K-Drama” atau “Abizar anggap fans Korea terlalu fanatik.”

Dari sini, wacana berkembang secara masif karena proses produksi makna tidak lagi dikontrol oleh pembicara (Abizar), tetapi oleh distribusi dan interpretasi publik melalui media sosial. Netizen kemudian menciptakan ulang makna pernyataan tersebut sesuai dengan *kerangka budaya digital Indonesia* yang sangat sensitif terhadap kesan sombong, tidak sopan, atau menyepelekan fandom besar seperti pecinta K-Drama.

Distribusi Wacana: Reproduksi dan Viralitas di Media Sosial

Setelah video wawancara Abizar viral, ribuan komentar dan konten turunan muncul di berbagai platform. Pada level distribusi, terjadi sirkulasi wacana yang memperkuat narasi negatif melalui:

1. Caption repost akun gosip dan hiburan (seperti @lambe_turah, @insertlive, dll) yang mempertegas sisi “arogan”-nya.
2. Komentar-komentar publik (seperti 20 data komentar di atas) yang memperluas wacana dengan bentuk *repetition* dan *variation*: kata “songong”, “sombong”, “BOYCOTT”, “nggak ada adab” terus diulang hingga menjadi *tagline moral*.
3. Meme, editan video, dan duplikasi komentar yang menandai proses *intertekstualitas digital* wacana tidak berhenti di satu unggahan, tetapi terus direproduksi oleh pengguna lain dengan gaya sarkastik.

Dalam konteks ini, publik bukan sekadar konsumen pasif, tetapi produsen makna baru. Mereka menggunakan bahasa untuk membentuk posisi sosial: netizen menjadi hakim moral, sementara Abizar ditempatkan sebagai simbol ketidaksopanan publik figur muda.

Konsumsi Wacana: Praktik Interpretasi Kolektif Publik

Tahap konsumsi wacana menunjukkan bagaimana audiens membaca dan menafsirkan teks. Berdasarkan data komentar, netizen mengonsumsi pernyataan Abizar dengan kerangka moral dan emosional, bukan artistik. Artinya, publik tidak menilai kualitas akting, melainkan kepribadian dan etika komunikasinya. Pernyataan “kalau nggak suka ya nggak usah nonton” dibaca sebagai bentuk tantangan dan kesombongan, bukan ekspresi kepercayaan diri profesional.

Konteks sosial budaya Indonesia yang menjunjung tinggi *sopan santun*, *kerendahan hati*, dan *tata krama publik figur* memperkuat kecenderungan publik untuk menilai ucapan tersebut secara etis, bukan pragmatis. Akibatnya, *cancel culture* terhadap Abizar tidak hanya disebabkan oleh isi wawancara, tetapi oleh cara masyarakat Indonesia mengonsumsi dan memaknai bahasa sebagai indikator moral.

3. Analisis Makro (Praktik Sosial dan Ideologis)

Pada level makro, analisis diarahkan pada ideologi, nilai, dan relasi kekuasaan yang mendasari munculnya wacana *cancel culture* terhadap Abizar.

Wacana yang dominan dalam komentar netizen menunjukkan adanya nilai-nilai ideologis yang hidup di masyarakat digital, seperti:

1. Nilai kesopanan dan moralitas publik ditunjukkan melalui komentar seperti “Pentingnya sekolah biar tau adab” dan “Katanya situ paham agama kok suka adegan pegangan tangan.”

2. Nilai keadilan sosial dan anti-privilege terlihat dalam komentar “*Kok bisa dia sih pemeran utamanya?*” yang menyoroti nepotisme.
3. Nilai pengendalian sosial digital tampak melalui komentar “*BOYCOTTT!*” atau “*Ngapain juga ditonton film dia*”, yang merupakan bentuk *collective punishment* simbolik.

Melalui wacana tersebut, publik membangun kekuasaan simbolik (symbolic power) sebagaimana dijelaskan Fairclough, di mana bahasa menjadi alat untuk mengontrol, menilai, dan menekan individu dalam struktur sosial digital. Figur publik seperti Abizar menjadi objek dari praktik wacana yang sarat ideologi di mana norma moral, agama, dan kesantunan digunakan sebagai alat legitimasi untuk “membatalkan” (cancel) seseorang di ruang publik.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana cancel culture bukan sekadar ekspresi kebencian, melainkan praktik sosial yang mengandung relasi kekuasaan antara publik dan figur selebritas. Publik memegang kendali simbolik melalui wacana, sementara figur publik kehilangan otoritas atas citranya sendiri.

SIMPULAN

Fenomena *cancel culture* terhadap Abizar Al Ghifari dalam promosi film *Proposal Business* menunjukkan bahwa bahasa berperan sentral dalam membangun kekuasaan simbolik dan kontrol sosial di ruang digital. Melalui komentar bernada perintah, sarkasme, dan evaluasi moral, netizen memosisikan diri sebagai otoritas moral yang menegur, mengadili, dan menghukum figur publik yang dianggap melanggar norma sosial. Dalam perspektif Fairclough, praktik ini merepresentasikan relasi kuasa di mana wacana publik tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga alat reproduksi nilai moral dan identitas kolektif masyarakat Indonesia. Dengan demikian, *cancel culture* di Indonesia tidak sekadar bentuk penolakan terhadap individu, melainkan mekanisme sosial-linguistik yang menegaskan dominasi suara publik dalam ruang budaya populer digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Altamira, M.B. and Movementi, S.G. (2023) ‘Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur’, *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), p. 5.
- Fairclough, N. (2002) *New labour, new language?* Routledge.
- Fairclough, N. (2003) *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Psychology Press.
- Fiantika, F.R. et al. (2022) ‘Metodologi penelitian kualitatif’, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March)*. Surabaya: PT. Pustaka Pelajar. <https://scholar.google.com/citations> [Preprint].
- Firdaus, Y. A., & Firman, H. (2025). ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP

PERNYATAAN DEDI MULYADI TENTANG PENGHAPUSAN WISUDA
SEKOLAH: PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH. *RELASI: Jurnal
Penelitian Komunikasi* (e-ISSN: 2807-6818), 5(04), 378-388.

- Kevin, A. (2023) 'Analisis Fenomena Cancel Culture dalam Etika "Klik" Manusia di Era Digital Menurut F. Budi Hardiman', *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), pp. 197–203.
- Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., & Suhatmady, B. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 6(3), 739-762.
- PRADANA, R.O.D. (2018) 'WACANA KEKUASAAN TOKOH TOMODACHI DALAM FILM TRILOGI 20 TH CENTURY BOYS KARYA YUKIHIKO TSUTSUMI'.
- Purba, A., Rahmadani, P., & Sari, S. (2024). Analisis wacana kritis Fairclough dalam teks iklan Sprite 2024. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*
- Sasmitha, N. W. D. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Stand-Up Comedy Mamat Alkatiri pada Program "Somasi". *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 44-58. *Nusantara*, 5(2), 2185-2191.
- Yasa, I.N. (2021) *Teori Analisis Wacana Kritis, Pustaka Larasan*.